

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO 2016

No. Publikasi : 33060.1723  
Katalog BPS : 4102004.3306

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : xii + 66 halaman

Naskah :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Penyunting :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Gambar Kulit :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Diterbitkan oleh :  
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Dicetak oleh :  
-----

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# Kata Pengantar

---

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purworejo 2016** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan kemiskinan. Dengan demikian, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purworejo 2016** diharapkan mampu menjembatani penyedia dan pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berperan dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan demi penyajian yang lebih baik di masa mendatang kepada segenap penggunanya.

Purworejo, Desember 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Purworejo



Drs. Wazirrudin



## Daftar Isi

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	x
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xi
<b>Bab 1. Kependudukan</b> .....	3
Indikator Demografi Kabupaten Purworejo .....	3
Wanita dan Fertilitas .....	6
<b>Bab 2. Kesehatan</b> .....	11
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	11
Tingkat Imunitas dan Gizi Balita .....	13
Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan .....	15
<b>Bab 3. Pendidikan</b> .....	21
Angka Melek Huruf .....	22
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah .....	23
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....	25
Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) .....	27

<b>Bab 4.</b>	<b>Ketenagakerjaan .....</b>	<b>29</b>
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	29
	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan .....	32
	Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan .....	34
	Jumlah Jam Kerja .....	36
<b>Bab 5.</b>	<b>Taraf dan Pola Konsumsi .....</b>	<b>39</b>
	Pengeluaran Rumah Tangga .....	39
	Konsumsi Energi dan Protein .....	42
<b>Bab 6.</b>	<b>Perumahan dan Lingkungan .....</b>	<b>45</b>
	Kualitas Rumah Tinggal .....	45
	Fasilitas Rumah Tinggal .....	47
	Status Kepemilikan Rumah Tinggal .....	49
<b>Bab 7.</b>	<b>Kemiskinan .....</b>	<b>51</b>
	Perkembangan Penduduk Miskin .....	51
	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) .....	52
	Karakteristik Rumah Tangga Miskin .....	54
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>59</b>
	<b>Lampiran .....</b>	<b>61</b>

## Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo, 2012-2016 .....	5
Tabel 1.2	Indikator Demografi Kabupaten Purworejo, 2012-2017.....	6
Tabel 2.1	Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk dengan Lama Sakit $\geq$ 4Hari, 2015 dan 2016, 2016 .....	13
Tabel 2.2	Beberapa Indikator Kesehatan Balita (Persen) Kabupaten Purworejo, 2015 dan 2016.....	14
Tabel 2.3	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2015 dan 2016 .....	17
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Purworejo, 2015 dan 2016 .....	18
Tabel 3.1	Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2014 dan 2015 .....	24
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2016 .....	26
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), 2015 dan 2016 .....	27
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2013-2015 .....	30
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015 .....	33



Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2014-2015 .....	34
Tabel 4.4	Persentase Penduduk yang bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2014-2015 .....	35
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu dan Rata-rata Jam Kerja Selama Seminggu, 2014-2015 .....	36
Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2015 dan 2016 .....	40
Tabel 5.2	Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah), 2016.....	41
Tabel 5.3	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Idneks Gini, 2012-2016 .....	41
Tabel 5.4	Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal , 2015-2016 .....	43
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan , 2014-2016 .....	46
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita , 2014-2016 .....	47
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan , 2014-2016 .....	48
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah Tinggal , 2014-2016 .....	49
Tabel 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2011 – Maret 2016 .....	52

Tabel 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2011-2016 .....	53
Tabel 7.3	Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin, 2011-2016 .....	55
Tabel 7.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Sektor Bekerja, 2011-2016 .....	56
Tabel 7.5	Karakteristik Perumahan Pada Rumah Tangga Miskin, 2013- 2016 .....	57

<https://purworejokab.bps.go.id>

## Daftar Gambar

		Halaman
Gambarl 1.1	Persentase Wanita Umur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2015 dan 2016 .....	7
Gambar 1.2	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015 dan 2016 .....	8
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2015 dan 2016 .....	23
Gambar 3.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2010-2016 .....	24
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Daerah, 2013-2015 .....	32

## Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo Menurut Kecamatan, 2010-2016 .....	63
Lampiran 2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo (orang/km <sup>2</sup> ) Menurut Kecamatan, 2010-2016 .....	64
Lampiran 3. Kemiskinan Kabupaten Purworejo, 2011-2016.....	65

<https://purworejokab.bps.go.id>



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PURWOREJO

## 2016

Σ Penduduk : **712.686** JIWA

Rasio Jenis Kelamin : **97,31**



Harapan Lama Sekolah :

**13,05 Tahun**

Rata-rata Lama Sekolah :

**7,66 Tahun**

Angka Kesakitan : **19,01**

Penduduk Berobat Jalan di Puskesmas :

**33,87 %**

Rumah tangga berlantaikan bukan tanah : **87,53 %**

Rumah tangga dengan jamban sendiri : **78,94 %**

Rata-rata pengeluaran/Kapita/Bulan :

**Rp 609.266,-**

Indeks Gini 2015 :

**0,34**



TPAK 2015 :

**68,86**

TPT 2015 :

**4,01**

Garis Kemiskinan :

**Rp 313.931/Kapita/Bulan**

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa):

**99,07**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PURWOREJO**



# 1. Kependudukan

## Indikator Demografi Kabupaten Purworejo

Penduduk merupakan aset berharga suatu negara. Selain sebagai modal dasar dalam pembangunan, penduduk merupakan faktor dominan yang harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Penduduk berperan sebagai pelaksana pembangunan dan juga merupakan sasaran akhir dari perencanaan pembangunan seperti kesejahteraan penduduk, kesehatan penduduk, keamanan penduduk, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya.

Menurut Robert Thomas Robert Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu kependudukan yang lebih populer disebut dengan Prinsip Kependudukan (*The Principle of Population*) yang menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan, akan berkembangbiak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat pula beberapa bagian dan permukaan bumi ini dan ia juga menyatakan bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan sehingga inilah yang menjadi sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia (Mantra, 2000). Dengan demikian, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya pembangunan yang ideal.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, diharapkan terwujud keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.



Menanggapi berbagai persoalan kependudukan, data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang penting sebagai dasar perencanaan kebijakan ke depan.

Data kependudukan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2020 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2016 tercatat sebanyak 712.686 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu dari 702.678 jiwa pada tahun 2012 menjadi 712.686 jiwa pada tahun 2016. Akan tetapi, mengamati laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 justru menunjukkan kecenderungan yang menurun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,43 persen dan menurun menjadi 0,32 persen pada tahun 2016.

Laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi. Walaupun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung menurun, tetapi berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2010-2020, penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2010 hingga tahun 2020 secara jumlah cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Purworejo mencapai sekitar 354.922 orang. Dengan adanya peningkatan penduduk ini, perlu adanya perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk.

**Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo, 2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Rasio jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	702.678	0,43	97,35
2013	705.527	0,41	97,34
2014	708.006	0,35	97,32
2015	710.386	0,34	97,33
2016	712.686	0,32	97,31

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo 2010-2020

Sementara itu, bila dilihat komposisi penduduk Kabupaten Purworejo menurut jenis kelamin pada tahun 2016 menggambarkan rasio jenis kelamin sebesar 97,31. Angka ini menunjukkan bahwa secara global, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki atau terdapat 97 orang penduduk laki-laki di antara 100 orang penduduk perempuan. Secara umum sejak tahun 2012 hingga 2016 angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Purworejo menunjukkan kecenderungan yang sama. Angka rasio jenis kelamin ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain rasio jenis kelamin pada saat lahir, pola mortalitas dan mungkin juga pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Guna mengetahui gambaran umum yang lebih lengkap mengenai penduduk Kabupaten Purworejo, beberapa indikator demografi terpilih disajikan pada tabel 1.2. Seiring jumlah penduduk yang semakin bertambah, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 679 orang/km<sup>2</sup> dan meningkat menjadi 689 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 2016. Dilihat dari persebarannya, lebih dari 11 persen penduduk Kabupaten Purworejo terkonsentrasi di Kecamatan Purworejo, sedangkan sekitar 4 hingga 8 persen masing-masing tersebar di 15 kecamatan lainnya (Lampiran 1).

**Tabel 1.2 Indikator Demografi Kabupaten Purworejo, 2012-2017**

Indikator Demografi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )	679	682	684	686	689
Komposisi Penduduk (persen)					
0-14 tahun	24,69	24,32	23,97	23,63	23,29
15-64 tahun	64,46	64,63	64,76	64,84	64,89
65+ tahun	10,85	11,05	11,28	11,53	11,82
Angka Beban Ketergantungan (persen)	55,12	54,74	54,42	54,22	54,10
Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo 2010-2020					

Komposisi penduduk menurut kelompok umur bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65+ tahun). Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo adalah penduduk usia produktif dengan tren yang semakin meningkat di atas 60 persen, sementara tren penduduk usia muda menunjukkan tren yang menurun.

Peningkatan struktur penduduk usia produktif dan penurunan struktur penduduk usia tidak produktif (usia muda dan lansia) berdampak pada angka beban ketergantungan. Selama lima tahun terakhir, angka beban ketergantungan menunjukkan kecenderungan yang menurun yakni dari 55,12 pada tahun 2012 menjadi 54,10 pada tahun 2016. Angka beban ketergantungan tahun 2016 sebesar 54,10 dapat diartikan setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 54 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia.

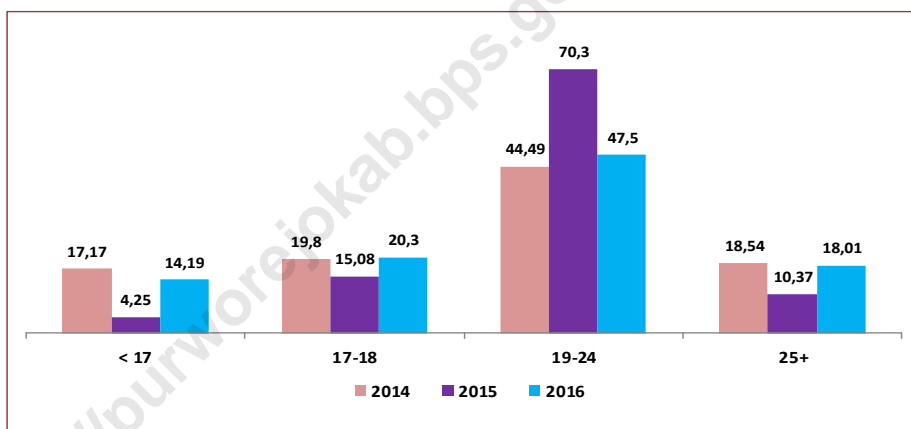
## Wanita dan Fertilitas

Jumlah penduduk yang besar disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah angka kelahiran yang tinggi. Sementara itu, tingginya angka kelahiran ditentukan oleh faktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi di

antaranya adalah struktur umur, status perkawinan dan umur kawin, sedangkan faktor non demografi antara lain keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perkawinan, urbanisasi dan industrialisasi.

Berbicara mengenai faktor demografi yang memengaruhi fertilitas terutama umur kawin berarti berbicara mengenai masa reproduksi seorang perempuan. Semakin panjang masa reproduksi, maka jumlah anak yang dilahirkan semakin banyak. Masa reproduksi perempuan dapat dihitung dari usia kawin pertama.

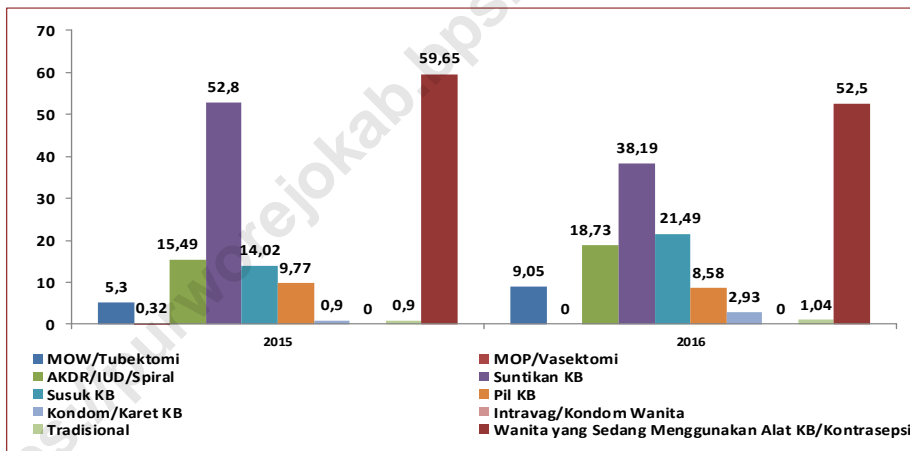
**Gambar 1.1 Persentase Wanita Umur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2015 dan 2016**



Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan persentase perempuan umur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama. Seperti terlihat pada Gambar 1.1, persentase perempuan pernah kawin dengan usia kawin pertama 19 tahun ke atas selama tahun 2015 hingga 2016 telah mencapai lebih dari 65 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa usia perkawinan pertama terus menuju kondisi ideal yaitu pada umur 20 tahun ke atas. Akan tetapi, perlu diperhatikan peningkatan persentase perempuan pernah kawin dengan usia kawin pertama kurang dari 17 tahun yang pada tahun 2016 ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi sekitar 3 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih memberikan perhatian pada kasus pernikahan dini.

Sejatinya, kurang berhasilnya pengendalian angka kelahiran melalui pergeseran usia perkawinan pertama pada perempuan berusia 10 tahun ke atas, dapat diimbangi melalui cara lain yang lebih efektif yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Akan tetapi, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2 bahwa secara keseluruhan persentase perempuan berumur 19-45 tahun berstatus kawin dan sedang menggunakan alat KB di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan berkurangnya persentase perempuan yang sedang memakai alat/metode kontrasepsi seperti MOW/Tubektomi dan Suntik KB.

**Gambar 1.2 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015 dan 2016**



Dilihat dari jenis alat kontrasepsi yang digunakan, metode suntik merupakan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan selama dua tahun terakhir. Akan tetapi, persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawain yang menggunakan alat/metode suntik pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 52,80 persen menjadi 38,19 persen. Penurunan ini lebih dikarenakan meningkatkan penggunaan AKDR/IUD/Spiral dan Susuk KB. Pada tahun 2016, AKDR/IUD/Spiral digunakan oleh sekitar 19 persen perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin atau bertambah dibandingkan tahun 2015. Demikian halnya dengan penggunaan Susuk KB yang sebelumnya hanya

digunakan oleh sekitar 14 persen perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin pada tahun 2015 menjadi sekitar 21 persen tahun 2016. Sementara itu, kondom wanita/intravag masih merupakan alat/metode kontrasepsi modern yang paling jarang digunakan.

<https://purworejokab.bps.go.id>



## 2. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah yang semakin baik dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah Kabupaten Purworejo melalui RPJMD 2016-2021 melaksanakan berbagai program prioritas dan sasaran di bidang kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

### Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Kualitas kesehatan di masyarakat dapat diukur dari derajat kesehatan. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan antara lain kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lainnya. Banyak teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi derajat



kesehatan. Namun demikian, teori yang paling banyak digunakan adalah teori Blum. Konsep ini digagas oleh Henrik L. Blum pada tahun 1974 dalam tulisannya berjudul *Planning for Health*.

H.L Blum (1974) dalam Foller (1992) menjelaskan ada empat faktor utama yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan. Keempat faktor tersebut terdiri dari faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan dan faktor genetik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang memengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Faktor lingkungan merupakan faktor determinan yang paling besar, disusul dengan faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan genetik. Faktor lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan.

Sementara itu, merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maka morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dapat diartikan semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas 2016 seperti pada tabel 2.1 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Purworejo mencapai 19,01 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,01 persen. Peningkatan angka kesakitan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Angka kesakitan penduduk perempuan meningkat pada tahun 2016 menjadi 19,48 persen dari 16,01 persen tahun 2015.

Sementara itu, lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2016 tidak serta merta dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang menurun, namun sebaliknya terjadi penurunan persentase penduduk yang menderita sakit lebih dari 3 hari lamanya. Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan penduduk yang menderita sakit lebih dari 3 hari selama satu bulan terakhir mengalami penurunan menjadi 45,56 persen dari 52,20 persen pada tahun sebelumnya. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan yang menderita sakit lebih dari 3 hari juga mengalami penurunan pada tahun 2016. Selama dua tahun terakhir, persentase penduduk perempuan yang menderita sakit lebih dari 3 hari selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

**Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk dengan Lama Sakit  $\geq$  4 Hari, 2015 dan 2016**

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan (%)		Lama Sakit $\geq$ 4 Hari (%)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	18,01	18,54	49,78	41,45
Perempuan	16,01	19,48	54,85	49,37
Laki-laki+Perempuan	17,01	19,01	52,20	45,56

Sumber : Susenas, 2015-2016

## Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar

untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui disajikan dengan tujuan untuk dapat mengetahui berapa persen dari anak-anak yang berusia 0 tahun hingga hampir 2 tahun (0-23 bulan) yang pernah disusui. Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa anak usia dibawah usia 2 tahun di Kabupaten Purworejo yang pernah disusui ada sebanyak 93,89 persen tetapi menurun pada tahun 2016 menjadi 90,00 persen. Rata-rata lama disusui untuk anak usia di bawah 2 tahun sekitar 9,43 bulan pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sekitar 10,21 bulan pada tahun 2016. Peningkatan tersebut juga diimbangi dengan meningkatnya persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang diberi ASI Eksklusif pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

**Tabel 2.2 Beberapa Indikator Kesehatan Balita (Persen), Kabupaten Purworejo, 2015 dan 2016**

Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)
<b>Anak usia kurang dari 2 tahun</b>		
Anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui (%)	93,89	90,00
Rata-rata Lama disusui (bulan)	9,43	10,21
Anak usia kurang dari 2 tahun yang diberi ASI Eksklusif (%)	51,88	61,37
<b>Persentase Balita yang Pernah mendapat Imunisasi</b>		
BCG	97,90	98,05
DPT	93,54	93,47
Polio	97,19	95,82
Campak	90,81	80,28
Hepatitis B	91,57	96,76
Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	74,55	77,25
Sumber : Susenas, 2015-2016		

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir berdasarkan hasil Susenas 2015 dan 2016, rata-rata balita di Kabupaten Purworejo yang pernah mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 96 persen. Kesemua jenis imunisasi mulai dari BCG, DPT, Polio dan hepatitis B masing-masing telah diberikan kepada lebih dari 90 persen balita selama 2 tahun terakhir, bahkan balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG dan Polio, masing-masing telah mencapai lebih dari 95 persen pada tahun 2016. Selain itu, sebanyak 77,25 persen balita pada tahun 2016 telah mendapatkan imunisasi lengkap.

### **Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan**

Tidak semata hanya kesehatan balita, kesehatan ibu juga merupakan salah satu yang menjadi perhatian dalam pembangunan global. Di beberapa negara khususnya negara berkembang dan negara belum berkembang, para ibu masih memiliki resiko tinggi ketika melahirkan. Situasi ini telah mendorong komitmen internasional untuk mengatasi permasalahan kesehatan ibu. Komitmen ini diwujudkan dengan mencantumkan kesehatan ibu sebagai salah satu target tujuan MDGs (*Millenium Development Goals*).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tidak lain merupakan kelanjutan dari target-target *MDGs* berfokus dalam hal bagaimana mewujudkan pembangunan manusia. Beberapa sasaran mengenai kesehatan ibu yang belum selesai dalam *MDGs*, masih menjadi sasaran dalam *SDGs* seperti kesehatan ibu. Indikator yang digunakan dalam monitoring kesehatan ibu yaitu angka kematian ibu/maternal, proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan angka pemakaian kontrasepsi.

Kematian maternal berhubungan erat dengan penggunaan fasilitas kesehatan selama kehamilan dan pada saat melahirkan. Telah dibuktikan bahwa tingginya angka kematian ibu, neonatal dan kematian anak berhubungan dengan kurang memadai dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, meliputi pelayanan kehamilan (*antenatal care*), tenaga kesehatan terlatih pada saat kelahiran (*skill birth attendance*), dan pelayanan setelah melahirkan (*postnatal care*) (Carroli, Rooney, dan Villar 2001; Li *et al.* 1996 dalam Wang *et al.*, 2011).

Memadainya tenaga kesehatan terlatih pada saat melahirkan sangat penting untuk mengurangi rasio kematian maternal. Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan selama tahun 2015-2016 sudah cukup baik yaitu mencapai lebih dari 98 persen, sedangkan sekitar 2 persen ditolong oleh selain tenaga kesehatan. Perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin paling banyak ditolong oleh bidan dalam proses melahirkan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 52,99 persen, disusul kemudian ditolong oleh dokter yaitu sebanyak 42,93 persen.

**Tabel 2.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2015 dan 2016**

Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)
<b>Tenaga Kesehatan</b>		
Dokter	26,74	42,93
Bidan	69,41	52,99
Tenaga Kesehatan Lainnya	2,11	2,22
<b>Bukan Tenaga Kesehatan</b>		
Dukun Beranak, Paraji	1,74	1,86
Lainnya	0,00	0,00
Sumber : Susenas, 2015-2016		

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan, tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Dalam rangka mengendalikan kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, pemerintah telah berupaya untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS bertujuan membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya memperoleh pelayanan kesehatan gratis dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau. Hal ini tentunya sangat mendukung tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo menjadi lebih baik lagi. Sejak dimulainya program BPJS pada Bulan Januari tahun 2014, terjadi perubahan kondisi tahun 2015 ke tahun 2016 yang tidak begitu signifikan namun ada peningkatan. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan tenaga ahli/spesialis di bidangnya tentunya berimplikasi pada biaya yang mahal, namun dengan BPJS tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat dapat meningkat.

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Purworejo, 2015 dan 2016**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah sakit Pemerintah	10,66	8,90	4,77	6,21	6,36	7,11
Rumah Sakit Swasta	10,50	4,72	3,54	7,42	5,42	6,53
Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama/Petugas Kesehatan	46,16	38,39	55,35	51,72	52,87	47,28
Puskesmas/Pustu	35,95	38,81	28,93	31,41	30,83	33,87
Pengobatan Tradisional	2,92	6,13	1,63	2,04	1,98	3,40
Lainnya (UKBM, Dukun Bersalin, dan lainnya)	3,16	7,46	8,43	6,63	7,00	6,90
% Penduduk yang Berobat Jalan	48,95	64,33	56,20	52,21	54,03	55,70

Sumber : Susenas, 2015-2016

Persentase penduduk yang berobat ke rumah sakit meningkat dari 11,78 persen pada tahun 2015 menjadi 13,64 persen di tahun 2016. Begitu pula dengan pemanfaatan puskesmas yang meningkat, hal ini berkaitan dengan BPJS yang sudah hampir seluruh masyarakat atau penduduk memanfaatkannya untuk memeriksakan sakitnya ke puskesmas. Penduduk yang pergi ke puskesmas tercatat sebesar 30,83 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 33,87 persen pada tahun 2016. Peningkatan kunjungan penduduk yang berobat terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Sementara itu, penduduk yang berobat jalan untuk memeriksakan penyakit meningkat dari 48,95 persen pada tahun 2015 menjadi 64,33 persen pada tahun 2016. Akan tetapi, peningkatan ini hanya terjadi di daerah perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan justru mengalami penurunan.





### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan bagi manusia diantaranya pendidikan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang luas bagi manusia. Dengan ilmu yang dimiliki, setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang ia inginkan, menjadi seperti apa yang ia cita-citakan dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan memberikan pelajaran yang penting mengenai dunia sekitar dan mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Dengan pendidikan, manusia juga dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berkarakter sehingga membuat manusia lebih beradab.

Todaro (2014) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga karena pendidikan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.

Perlu disadari bersama arti pentingnya pendidikan dalam pembangunan suatu negara dan daerah. Sehubungan dengan hal itu pemerintah dan masyarakat senantiasa berusaha terus untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya adalah dengan menetapkan suatu tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan di daerah sehingga diharapkan dapat menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah. Tolok ukur tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Selain itu juga, pemerintah juga telah menetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja pemerintah (pusat dan daerah).

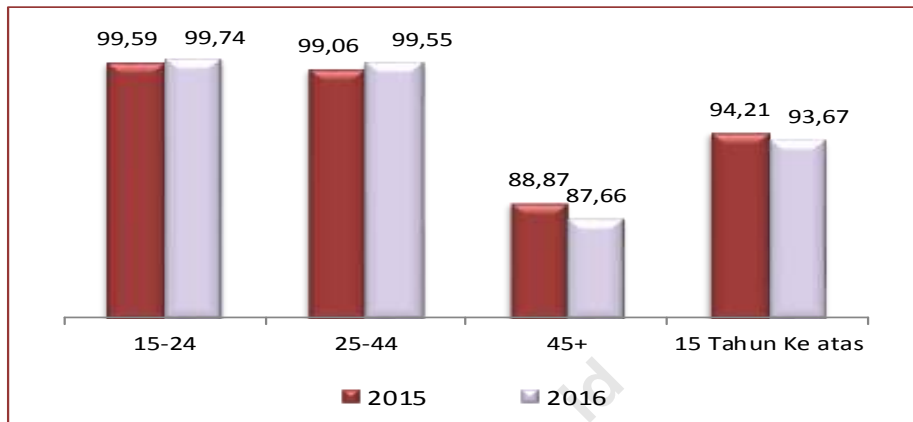
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber belajar serta daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

## Angka Melek Huruf

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

**Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2015 dan 2016**



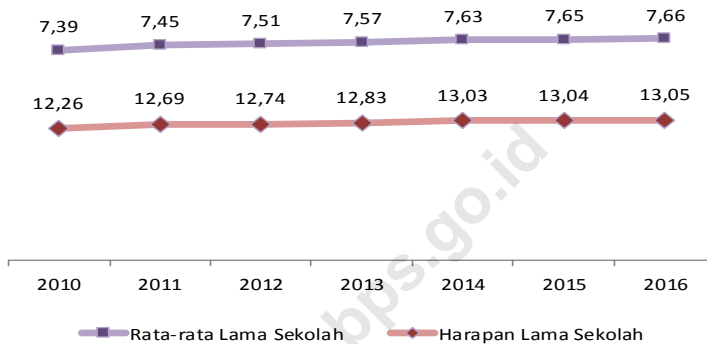
Berdasarkan Hasil Susenas 2016, penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau lainnya sebanyak 6,37 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 7 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2015, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2016 mengalami penurunan padahal penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

### Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menghitung pendidikan dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran

keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

**Grafik 3.2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2010-2016**



Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2010 hingga 2016. Secara rata-rata angka harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,05 persen per tahun selama tahun 2010-2016, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hanya tumbuh sebesar 0,60 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

**Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2014 dan 2015**

Indikator Pendidikan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Harapan Lama Sekolah	13,03	13,04
Laki-laki	13,58	13,59
Perempuan	12,55	12,55
Rata-rata Lama Sekolah	7,63	7,65
Laki-laki	8,38	8,40
Perempuan	7,07	7,16

Sumber : BPS RI

Sementara itu, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Purworejo pada tahun 2015 adalah 13,04 tahun yang artinya anak usia sekolah (7 tahun ke atas) di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat merasakan sekolah selama 13 tahun di masa mendatang atau bisa mencapai kuliah sampai semester 2 jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah ini selama 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bila diamati menurut jenis kelamin, HLS penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Indikator lainnya yaitu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo pada tahun 2015 sebesar 7,65 tahun. Artinya, bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Purworejo baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah dikelas 2 SMP.

Bila diamati menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yaitu terpaut sekitar 1 tahun. Dalam rangka mencapai tujuan “Pendidikan untuk Semua”, pemerintah terus menekankan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 sampai 15 tahun. Pemerintah tidak membatasi peluang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Terjadinya perbedaan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan diduga disebabkan oleh faktor budaya yang masih melekat pada masyarakat Kabupaten Purworejo khususnya di daerah perdesaan, seringkali anak laki-laki yang lebih diberikan kesempatan untuk bersekolah yang lebih tinggi.

### **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM merupakan modal dalam menghadapi persaingan global.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/MI/Paket A menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 40,15 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas masih banyak yang bersekolah hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Bahkan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP/MTS/Paket B hanya sebesar 13,81 persen, lebih rendah dari angka pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang pendidikan menengah. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan SMA/MA/SMK/Paket C tercatat sebesar 19,78 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang Perguruan Tinggi sebesar 4,87 persen.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2016**

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3,74	2,10	9,55	6,66	6,74	4,44
Belum Tamat SD/MI	11,52	11,74	12,56	16,13	12,06	13,99
SD/MI	33,55	44,85	31,57	40,16	32,52	42,44
SMP/MTS	19,36	10,13	20,07	9,85	19,73	9,99
SMA/SMK/MA	25,66	25,11	20,76	21,43	23,13	23,22
Perguruan Tinggi	6,17	6,07	5,50	5,77	5,83	5,92

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016

Tabel 3.2 juga menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dilihat dari jenis kelamin. Secara umum penduduk laki-laki mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Hal ini terlihat pada persentase penduduk laki-laki yang tidak/belum pernah bersekolah dan yang tidak tamat SD, lebih rendah dari penduduk perempuan. Sebaliknya, untuk penduduk laki-laki yang tamat SMA/SMK/MA hingga yang menyelesaikan perguruan tinggi, persentasenya lebih tinggi dari penduduk perempuan.

## Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi sekolah (APS) ialah persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk umur sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Seluruh penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 sudah mengenyam pendidikan atau sudah pernah bersekolah. Akan tetapi, pada kelompok usia 16-18 tahun masih terdapat sekitar 21,26 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan, sedangkan pada kelompok usia 19-24 tahun sekitar 66,22 persen penduduk belum mengenyam pendidikan. Tabel 3.3 juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki maupun perempuan pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun tidak menunjukkan perbedaan, pada kelompok usia 16-18 tahun APS perempuan lebih rendah dibandingkan APS laki-laki, sedangkan pada kelompok usia 19-24 tahun APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), 2015 dan 2016**

Indikator	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>						
7 - 12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 - 15	94,06	100,00	97,20	100,00	100,00	100,00
16 - 18	81,03	64,07	73,17	81,81	76,17	78,74
19 - 24	15,71	20,19	17,09	25,12	42,63	33,78
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>						
Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A)	100,00	100,00	100,00	100,00	98,69	99,36
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B)	81,35	78,49	79,84	79,00	69,99	74,87
Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA/Paket C)	74,58	59,17	67,43	68,37	77,40	73,40

Sumber : BPS, Susenas 2015-2016



Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Peningkatan APS diikuti pula dengan peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan untuk anak-anak mereka dengan tepat waktu. Secara umum APM SD sudah mencapai 100 persen. Namun demikian, APM SMP tahun 2016 justru mengalami penurunan dari 79,84 persen pada tahun 2015 menjadi 74,87 persen pada tahun 2016. Sedangkan untuk tingkat SMA meningkat dari 67,43 persen naik menjadi 73,40 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM SMP untuk laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan APM perempuan, APM laki-laki tercatat sebesar 81,35 persen, sementara APM SMP perempuan sebesar 78,49 persen pada tahun 2016. Begitu pula pada jenjang pendidikan SMA, APM laki-laki juga menunjukkan kondisi yang lebih tinggi dari pada perempuan, APM laki-laki tercatat sebesar 74,58 persen berbanding 59,17 persen APM perempuan.

## 4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian di Kabupaten Purworejo. Berbicara mengenai ketenagakerjaan, berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Purworejo antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, dan persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh sari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

**Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2013-2015**

Indikator	2013			2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TPAK	81,48	61,97	71,48	79,70	57,75	68,44	81,67	56,70	68,86
TPT	4,01	6,58	5,11	4,26	6,19	5,10	4,61	3,20	4,01

Sumber : BPS, Sakernas 2013-2015

TPAK Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari 71,48 persen pada tahun 2013 menjadi 68,44 persen pada tahun 2014 dan kembali meningkat menjadi 68,86 persen tahun 2015 kondisi Agustus. TPAK di Kabupaten Purworejo pada tahun 2015 sebesar 68,86 persen yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 69 orang termasuk angkatan kerja. Selain itu, dapat diartikan pula bahwa dari 1000 orang penduduk usia kerja sekitar 689 orang di antaranya aktif secara ekonomi.

Bila dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK penduduk laki-laki selama 3 tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk perempuan. TPAK penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2015 masing-masing sebesar 81,67 persen dan 56,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Purworejo lebih aktif secara ekonomi dibandingkan penduduk perempuan. TPAK penduduk laki-laki mengalami peningkatan dari 79,70 persen pada tahun 2014 menjadi 81,67 persen pada tahun 2015. Kondisi sebaliknya terjadi pada TPAK penduduk perempuan yang justru menurun yaitu dari 57,75 persen pada tahun 2014 menjadi 56,70 persen pada tahun 2015.

Selain TPAK, isu penting yang seringkali mendapatkan perhatian adalah isu pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak

bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan konsep tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*).

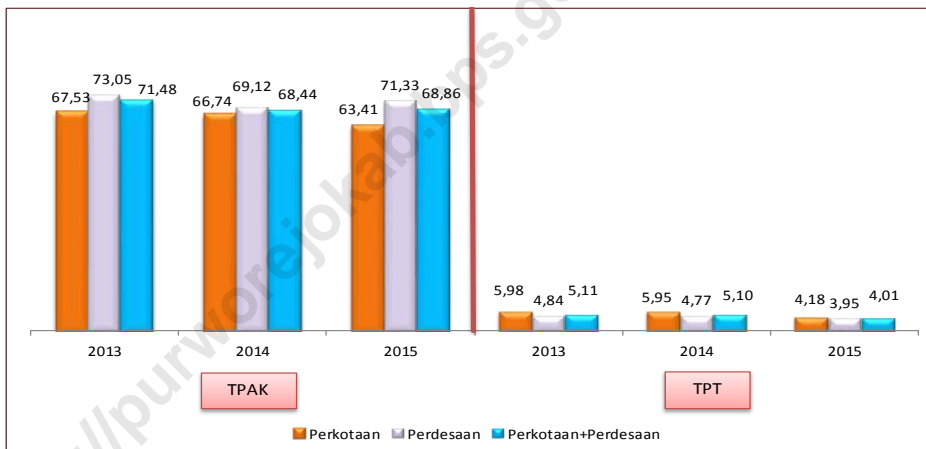
Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPT Kabupaten Purworejo selama periode 2013-2015 pada bulan Agustus terus menurun yaitu dari 5,15 persen pada tahun 2013 menjadi 5,10 persen pada tahun 2014, dan turun kembali menjadi 4,01 persen pada tahun 2015.

Bila dibedakan menurut jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki selama tahun 2013 hingga 2015 cenderung lebih stabil dibandingkan TPT perempuan. TPT penduduk laki-laki selama periode 2013-2015 berada pada kisaran 4 persen, pada tahun 2013 sebesar 4,01 persen, mengalami peningkatan menjadi 4,26 persen pada tahun 2014 dan kembali meningkat menjadi 4,61 persen pada tahun 2015. Sementara itu, TPT penduduk perempuan cenderung berfluktuatif yaitu dari 6,58 persen pada tahun 2013, turun 6,19 persen tahun 2014 dan kembali turun menjadi 3,20 persen pada tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan bahwa keadaan ketenagakerjaan penduduk laki-laki cenderung lebih stabil dibandingkan penduduk perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena penduduk laki-laki cenderung mempunyai pekerjaan yang lebih tetap dibandingkan penduduk perempuan.

Sementara itu, ditinjau dari klasifikasi daerah, terjadi penurunan TPAK Kabupaten Purworejo selama 2013-2015 pada bulan Agustus dari 71,48 menjadi 68,86 baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Selama periode yang sama, TPAK di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan, artinya penduduk di perdesaan lebih siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini kemungkinan dikarenakan lapangan pekerjaan di daerah perdesaan cenderung tidak membutuhkan persyaratan khusus dibandingkan perkotaan. Selain itu, fasilitas pendidikan tinggi jarang ditemukan di lokasi perdesaan sehingga hanya sebagian kecil penduduk perdesaan yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi.

Di sisi lain, TPT di daerah perkotaan selama periode 2013-2015 selalu lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan. Lebih tingginya TPT di daerah perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di daerah perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Namun demikian, dilihat dari perkembangannya selama periode tersebut TPT di daerah perdesaan maupun perkotaan terus mengalami penurunan, walaupun penurunan TPT di daerah perkotaan cenderung lebih cepat dibandingkan penurunan TPT di daerah perdesaan.

**Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Daerah , 2013-2015**



### Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap individu sejatinya mempunyai harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun, dikarenakan keterbatasan

lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Secara umum pada tabel 4.2 terlihat bahwa pada periode 2014 dan 2015, mayoritas penduduk yang menganggur berpendidikan SMA ke atas. Jika dilihat perkembangannya, terjadi peningkatan angka TPT berpendidikan SMA ke atas dari 6,87 persen pada tahun 2014 menjadi 8,92 persen pada tahun 2015. Pada jenjang pendidikan yang sama, peningkatan TPT juga terjadi di daerah perkotaan.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD/Ibtidaiyah	6,26	2,85	1,56	1,37	2,32	1,66
SMP/Tsanawiyah	6,46	3,31	7,97	1,98	7,58	2,26
SMA/SMK ke Atas	5,60	5,30	7,85	12,32	6,87	8,92
Jumlah	5,95	4,18	4,77	3,95	5,10	4,01

Sumber : BPS, Sakernas 2014-2015

Sementara itu, berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT penduduk berpendidikan SMA/Aliyah ke bawah semuanya mengalami penurunan angka TPT. Penurunan angka TPT pada jenjang pendidikan ini terjadi di daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk semakin meningkat di daerah perdesaan maupun perkotaan. Selain itu, dapat pula diindikasikan bahwa lapangan usaha untuk mereka yang berpendidikan tertinggi SMA/Aliyah ke bawah di daerah perdesaan maupun perkotaan semakin banyak.

## Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 5 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian (Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan); Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan; Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan).

Perkembangan lapangan usaha selama tahun 2014-2015, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor industri mengalami peningkatan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan industri kemungkinan dikarenakan menurunnya penyerapan tenaga kerja di tiga sektor lainnya pada periode ini. Penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di sektor Perdagangan yaitu dari 24,75 persen pada tahun 2014 menjadi 21,00 persen di tahun 2015.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2014-2015**

Lapangan Pekerjaan Utama	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	16,17	18,29	44,44	48,24	36,66	39,66
Industri	12,01	11,71	13,60	19,05	13,16	16,95
Perdagangan	32,59	32,71	21,78	16,29	24,75	21,00
Jasa	25,44	25,85	9,93	6,97	14,20	12,38
Lainnya	13,79	11,44	10,25	9,45	11,23	10,02

Sumber : BPS, Sakernas 2014-2015

\*) Pertanian adalah Pertanian, Kehutanan Perburuan, dan Perikanan  
 Industri adalah Industri pengolahan  
 Perdagangan adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel  
 Jasa adalah Jasa Kemasyarakatan  
 Lainnya adalah Pertambangan dan Penggalian, Listrik Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

Indikator lain untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan status pekerjaan utama selama tahun 2014-2015, penduduk Kabupaten Purworejo mayoritas bekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, disusul bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, selanjutnya berusaha sendiri di urutan ketiga.

Melihat perkembangannya selama tahun 2014-2015, persentase berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar meningkat dari 24,16 persen tahun 2014 menjadi 31,07 persen tahun 2015. Kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada persentase pekerja dengan status sebagai pekerja tak dibayar. Sementara itu, persentase pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di non pertanian justru menurun pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

**Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2014-2015**

Status Pekerjaan Utama	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	14,89	20,70	21,74	13,33	19,85	15,44
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	22,79	20,72	24,67	35,24	24,16	31,07
Berusaha dibantu buruh tetap	3,11	5,37	5,08	1,26	4,54	2,44
Buruh/karyawan/pegawai	39,59	36,89	20,90	14,86	26,04	21,17
Pekerja bebas di pertanian	3,73	1,75	6,99	7,51	6,10	5,86
Pekerja bebas di non pertanian	5,96	5,00	8,73	7,97	7,97	7,12
Pekerja tak dibayar	9,92	9,57	11,88	19,84	11,35	16,89

Sumber : BPS, Sakernas 2014-2015

Jika dilihat dari status daerah, struktur pekerja menurut status pekerjaan utama antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Daerah perkotaan lebih didominasi oleh pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai, persentasenya mencapai lebih dari 35 persen selama



tahun 2014-2015. Berbeda dari perkotaan, di daerah perdesaan komposisi pekerja yang terbesar adalah berstatus berusah dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar yang sejalan dengan tingginya persentase pekerja tak dibayar. Kondisi ini kemungkinan dikarenakan di daerah perdesaan pekerjaan di lapangan usaha bidang pertanian masih dominan. Kondisi ini juga didukung dengan tingginya persentase pekerja dengan status pekerja bebas di pertanian di daerah perdesaan.

### Jumlah Jam Kerja

Pada umumnya penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di atas jam kerja normal. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.5 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015, sebanyak 69,05 persen penduduk bekerja 35 jam atau lebih selama seminggu. Secara rata-rata jumlah jam kerja selama seminggu penduduk bekerja sekitar 40,95 jam.

**Tabel 4.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu dan Rata-rata Jam Kerja Selama Seminggu, 2014-2015**

Indikator	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Jam Kerja Seminggu Yang Lalu		
< 15	9,74	7,54
15 - 34	19,23	23,41
> 34	71,04	69,05
Rata-rata Jam Kerja Selama Seminggu		
Laki-laki	43,14	43,00
Perempuan	40,06	38,18
Laki-laki+Perempuan	41,82	40,95

Sumber : BPS, Sakernas 2014-2015

Bila dibandingkan jam kerja menurut jenis kelamin, jam kerja pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan jam kerja pekerja laki-laki. Rata-rata jam kerja pekerja laki-laki sekitar 43,00 jam, sedangkan rata-rata jam kerja pekerja perempuan sekitar 38,18 jam.

Lebih rendahnya jam kerja perempuan dibandingkan jam kerja laki-laki diduga disebabkan karena perempuan juga dituntut untuk berperan ganda di samping bekerja yaitu mengurus rumah tangga. Lain halnya dengan laki-laki yang merupakan tulang punggung rumah tangga dan pencari nafkah utama bagi rumah tangga, sehingga hal tersebut memengaruhi lebih tingginya jam kerja laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

<https://purworejokab.bps.go.id>



## 5. Taraf dan Pola Konsumsi

### Pengeluaran Rumah Tangga

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran masyarakat untuk makanan, pakaian, hiburan atau kebutuhan lainnya disebut pembelanjaan atau konsumsi. Pola konsumsi masyarakat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisa, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok pengguna yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran bukan makanan (Dumairy, 2002).

Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan dan non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang nonmakanan pada umumnya tinggi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jadi untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2015-2016 penduduk Kabupaten Purworejo meningkat dari Rp 609.266,- menjadi Rp 742.705,-. Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya penurunan yaitu dari 50,35 persen pada tahun 2015 menjadi 48,19 persen pada tahun 2016. Namun sebaliknya,

persentase pengeluaran bukan makanan meningkat dari 49,65 persen pada tahun 2015 menjadi 51,81 persen pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi dikarenakan meningkatnya pengeluaran barang dan jasa dari 13,89 persen pada tahun 2015 menjadi 15,31 persen pada tahun 2016 dan juga meningkatnya pengeluaran barang tahan lama dari 7,66 persen pada tahun 2015 menjadi 9,82 persen pada tahun 2016.

**Tabel 5.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2015 dan 2016**

Indikator	Pengeluaran Rata-rata perKapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	306.760	357.933	50,35	48,19
Bukan Makanan	302.506	384.772	49,65	51,81
Perumahan	123.975	147.304	20,35	19,83
Barang dan jasa	84.632	113.701	13,89	15,31
Pakaian	17.414	20.521	2,86	2,76
Barang Tahan Lama	46.675	72.906	7,66	9,82
Lainnya	29.810	30.341	4,89	4,09
Jumlah	609.266	742.705	100,00	100,00

Sumber : BPS, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2015-2016

Jika diamati sesuai kelompok pengeluaran pada tahun 2016, persentase pengeluaran untuk makanan selalu lebih besar dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan untuk semua golongan pengeluaran. Namun demikian, semakin tinggi kelompok pengeluarannya, semakin meningkat pula persentase pengeluaran untuk non makanan.

**Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah), 2016**

Kelompok Pengeluaran (Rupiah/perkapita/bulan)	Persentase dan Jumlah Penduduk	Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan (Rp)	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kurang dari 100.000	0,00	-	-	-
100.000 - 149.999	0,47	147.145	59,00	41,00
150.000 - 199.999	1,41	181.516	62,09	37,91
200.000 - 299.999	15,71	257.532	60,03	39,97
300.000 - 499.999	39,63	383.168	60,46	39,54
500.000 - 749.999	21,74	591.765	57,62	42,38
750.000 - 999.999	8,97	868.052	53,61	46,39
1.000.000 dan lebih	12,07	1.717.094	35,13	64,87
Kabupaten Purworejo	710.386	609.266	50,35	49,65

Sumber : BPS, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2015-2016

Selain itu, untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Disamping kriteria yang ditetapkan Bank Dunia, indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Gini.

**Tabel 5.3 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2012-2016**

Tahun	40 % Terendah	40 % Menengah	20 % Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	20,68	37,99	41,33	0,31
2013	21,35	34,58	44,07	0,34
2014	18,86	32,37	48,77	0,38
2015	19,74	34,76	45,50	0,34

Sumber : BPS, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2012-2015

Seperti ditunjukkan pada tabel 5.3 bahwa selama periode tahun 2012 sampai 2015 pada semua kelas penduduk yang berpendapatan rendah, sedang dan tinggi terlihat berfluktuatif. Kelas 40 persen penduduk berpendapatan paling rendah tercatat 20,68 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 21,35 persen pada tahun 2013, turun menjadi 18,86 persen pada tahun 2014, tetapi kembali naik menjadi 19,74 persen pada tahun 2015. Berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah yang berada pada angka di atas 17 persen selama kurun waktu 2012-2015 menggambarkan ketimpangan pendapatan yang rendah atau pemerataan pendapatan yang tinggi.

Sementara itu, koefisien gini selama kurun waktu 2012-2015 juga berfluktuatif. Koefisien gini selama periode tersebut menunjukkan angka di bawah 0,35 yang menggambarkan ketimpangan pendapatan rendah, hanya di tahun 2014 yang menunjukkan ketimpangan sedang dengan koefisien gini di antara 0,35 hingga 0,50 yaitu sebesar 0,38.

### **Konsumsi Energi dan Protein**

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

**Tabel 5.4 Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2016**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalori (kkal)			
2015	1.859,20	1.871,15	1.867,73
2016	1.931,19	2.058,94	2.021,18
Protein (gram)			
2015	52,11	47,89	49,10
2016	51,71	43,71	53,12

Sumber : BPS, Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2015-2016

Rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2016 sebanyak 2.021,18 kkal atau meningkat sebesar 153,45 kkal dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.867,73 kkal. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk pada tahun 2016 belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi yaitu masih kurang sebanyak 78,82 kkal. Seperti halnya konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga mengalami peningkatan yaitu dari 49,10 gram pada tahun 2015 menjadi 53,12 gram pada tahun 2016, yang berarti juga masih di bawah ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional dan Gizi.





## 6. Perumahan dan Lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Selain itu, rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal memengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

### Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal. Kriteria kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai, dan dinding terluas yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan.

Data Susenas 2016 memperlihatkan persentase rumah tangga yang berlantaikan bukan tanah di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2014 persentase rumah tangga yang berlantaikan bukan tanah sebesar 82,57 persen, meningkat menjadi 84,85 persen tahun 2015 dan kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 87,53 persen.

**Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2014-2016**

Indikator Kualitas Perumahan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Luas bukan tanah (%)	82,57	84,85	87,53
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%)	100,00	100,00	100,00
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	87,64	86,50	88,99

Sumber : BPS, Profil Tempat Tinggal Jawa Tengah 2014-2016

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan sebagai rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Selama tahun 2014 hingga 2016 seluruh rumah tangga di Kabupaten Purworejo telah menempati rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menempati rumah tinggal dengan dinding terluasnya tembok dan kayu juga mengalami peningkatan selama periode yang sama.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sementara itu, dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> (BPS, 2011 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016).

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita, 2014-2016**

Luas Lantai Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal (m <sup>2</sup> )	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
< = 5	0,15	2,06	0,51
6 - 7	0,51	1,40	0,97
8 - 9	2,28	2,77	2,19
10 - 12	7,03	9,40	10,39
13+	90,04	84,37	85,94

Sumber : BPS, Profil Tempat Tinggal Jawa Tengah 2014-2016

Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan oleh menteri kesehatan, lebih dari 95 persen rumah tangga memiliki luas lantai perkapita lebih dari 8 m<sup>2</sup>. Selama tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita yang memenuhi standar kementerian kesehatan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 96,54 persen dari 99,35 persen pada tahun 2014 kemudian meningkat kembali menjadi 98,52 persen pada tahun 2016.

### Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Besarnya persentase rumah tangga yang mengonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air ledeng pada periode 2014 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, persentase rumah tangga yang mengonsumsi air kemasan, air isi

ulang, dan ledeng sebesar 10,03 persen, meningkat menjadi 10,90 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 14,04 persen pada tahun 2016.

**Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2014-2016**

Fasilitas Perumahan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	10,03	10,90	14,04
Jamban sendiri	70,45	74,69	78,94
Sumber penerangan listrik	99,80	99,87	99,98

Sumber : BPS, Profil Tempat Tinggal Jawa Tengah 2014-2016

Selain konsumsi air bersih, penyediaan sarana jamban juga merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Tersedianya jamban dengan tangki septik merupakan upaya untuk mengelola pembuangan kotoran manusia yang baik sehingga dapat mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan. Apabila pembuangan kotoran tidak dikelola dengan baik maka akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Besarnya rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri pada tahun 2016 sudah mencapai 78,94 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2014-2016.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Data Susenas 2016 memperlihatkan sebesar 99,98 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik. Dilihat perkembangannya, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik selama tahun 2014 hingga 2016 terus meningkat dan telah mencapai lebih dari 99 persen.

## Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa dan status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah Tinggal, 2014-2016

Kepemilikan Rumah Tinggal	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	85,11	90,45	86,98
Kontrak, Sewa	2,38	1,10	2,24
Bebas Sewa	12,09	8,11	10,20
Lainnya	0,42	0,35	0,58

Sumber : BPS, Profil Tempat Tinggal Jawa Tengah 2014-2016

Berdasarkan hasil Susenas 2016, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 86,98 persen, sisanya 13,02 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 2,24 persen kontrak/sewa, bebas sewa 10,22 persen dan lainnya 0,58 persen.



## 7. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Pada dasarnya berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan, termasuk pemerintah Kabupaten Purworejo.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran.

Melalui publikasi ini akan disajikan informasi kemiskinan antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan tingkat pendidikan, status pekerjaan dan fasilitas perumahan.

### Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada periode September 2011 sampai Maret 2016 menunjukkan adanya tren penurunan baik secara jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Secara absolut, jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2011-2016 adalah sebesar 22,83 ribu jiwa, yaitu dari 121,9 ribu jiwa pada tahun 2011 menjadi 99,07 ribu jiwa tahun 2016.



Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 17,51 persen pada tahun 2011 menjadi 13,91 persen pada tahun 2016. Penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin paling jelas terlihat pada periode 2012-2013, sedangkan penurunan yang paling sedikit terjadi pada periode 2014-2015.

**Tabel 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2011 – Maret 2016**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
September 2011	121,90	17,51
September 2012 <sup>1)</sup>	114,80	16,32
September 2013 <sup>1)</sup>	109,00	15,44
September 2014	102,11	14,41
Maret 2015	101,25	14,27
Maret 2016	99,07	13,91

Sumber : BPS  
<sup>1)</sup> Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

### Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>), Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)

Berbicara tentang kemiskinan, tentu tidak luput dari Garis Kemiskinan (GK) sebagai ukuran yang digunakan BPS untuk menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. GK dibentuk dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GK senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan selama periode 2011-2016. Pada tahun 2011, garis kemiskinan di Kabupaten Purworejo sebesar Rp 235.459,- , kemudian meningkat menjadi Rp 273.481,- pada tahun 2013, terus meningkat menjadi Rp 294.158,- pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi Rp 313.931,- pada tahun 2016. Secara rata-rata, garis kemiskinan di Kabupaten Purworejo selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 6,85 persen setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, GK di Kabupaten Purworejo meningkat 6,72 persen dibandingkan tahun 2015.

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*).

**Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2011-2016**

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	235.459	254.314	273.481	284.409	294.158	313.931
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,82	2,78	1,98	1,85	2,43	2,67
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,74	0,65	0,43	0,42	0,63	0,76

Sumber : BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Purworejo periode 2011 hingga 2014, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Purworejo terus menunjukkan penurunan dari 2,82 pada tahun 2011, turun menjadi 2,78 pada tahun 2012, kembali turun menjadi 1,98 pada tahun 2013 dan terus turun menjadi 1,85 pada tahun 2014. Akan tetapi, pada tahun 2015 dan 2016 justru mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 2,43 pada tahun 2015 dan 2,67 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016, penduduk miskin di Kabupaten Purworejo lebih jauh di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Seperti halnya Indeks Kedalaman Kemiskinan, indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2011 hingga 2014 juga menunjukkan tren yang menurun, dari 0,74 pada tahun 2011 menjadi 0,42 pada tahun 2014. Akan tetapi, indeks ini justru meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,63 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,76.

## **Karakteristik Rumah Tangga Miskin**

### **Karakteristik Pendidikan**

Pendidikan memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seseorang dengan pendidikan yang tinggi diharapkan akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan tingkat pendapatan yang tinggi, sehingga pada akhirnya akan memperkecil peluang terjebak dalam kemiskinan. Karakteristik yang diuraikan dalam publikasi ini adalah persentase kepala rumah tangga miskin usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf penduduk miskin dan partisipasi sekolah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo.

Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo selama periode 2011-2016, salah satunya sejalan dengan membaiknya karakteristik pendidikan penduduk miskin. Persentase penduduk miskin yang berpendidikan SLTA ke atas pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 8,39 persen dibandingkan tahun 2011 yaitu dari 11,56 persen menjadi 12,53 persen pada tahun 2016.

**Tabel 7.3 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin, 2011-2016**

Karakteristik Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
- < SD	27,36	24,55	23,83	31,82	29,43	30,99
- Tamat SD/SLTP	61,08	65,56	58,97	56,77	56,81	56,48
- SLTA+	11,56	9,88	17,20	11,41	13,77	12,53
2. Angka Melek Huruf						
- 15-24 Tahun	96,77	100,00	100,00	100,00	97,04	97,91
- 15-55 Tahun	94,62	97,27	94,49	98,41	97,84	96,44
3. Angka Partisipasi Sekolah						
- 7-12 Tahun	96,98	100,00	97,28	100,00	100,00	100,00
- 13-15 Tahun	79,98	76,33	89,50	87,38	93,62	87,84

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2011-2016

Sementara itu, persentase angka melek huruf penduduk miskin pada periode 2011 hingga 2016 cenderung mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut terjadi pada semua kategori umur. Secara rata-rata, angka melek huruf pada kategori umur 15-24 tahun lebih tinggi dibandingkan kategori umur 15-55 tahun selama periode yang sama.

Karakteristik pendidikan lainnya dari penduduk miskin terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS penduduk miskin usia 7-12 tahun selama periode 2011-2016 selalu lebih tinggi dibandingkan APS penduduk miskin usia 13-15 tahun. Kondisi yang cukup menggembirakan bagi pemerintah Kabupaten Purworejo bahwa selama periode tersebut, APS pada semua kategori umur baik 7-12 tahun ataupun 13-15 tahun cenderung mengalami peningkatan. Dibandingkan kondisi APS tahun 2011, APS penduduk miskin usia 7-12 tahun meningkat sebesar 3,11 persen di tahun 2016, sedangkan APS penduduk miskin usia 13-15 tahun juga meningkat hingga 9,83 persen pada tahun 2016.

## Karakteristik Ketenagakerjaan

Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. Secara umum, penduduk miskin adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan dengan pendapatan rendah. Karakteristik pekerjaan penduduk inilah yang pada akhirnya dapat menggambarkan mampu tidaknya penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

**Tabel 7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Sektor Bekerja, 2011-2016**

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Bekerja <sup>*)</sup>	30,24	31,14	41,77	34,25	39,69	35,93
Bekerja	69,76	68,86	58,23	65,75	60,30	64,07
Bekerja di Sektor Pertanian	36,71	41,53	31,71	34,63	29,20	38,54
Bekerja bukan di Sektor Pertanian	33,05	27,33	26,52	31,12	31,10	25,53

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2011-2016  
<sup>\*)</sup> Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Selama periode 2011 hingga 2016, menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo, ternyata tidak searah dengan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin itu sendiri. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2011 sebanyak 69,76 persen. Akan tetapi pada tahun 2012 hingga 2016, persentase tersebut terus menunjukkan penurunan dan menjadi 64,07 persen di tahun 2016. Idealnya semakin kecil angka kemiskinan, semakin banyak penduduk miskin yang bekerja. Hal ini perlu menjadikan perhatian untuk pemerintah agar memperbanyak program-program pengentasan kemiskinan yang bersifat lebih produktif.

## Karakteristik Perumahan

Rumah yang sehat dan memenuhi syarat kesehatan akan berdampak langsung terhadap kesehatan penghuninya. Oleh karena itu, karakteristik

perumahan seperti luas lantai, sumber air minum dan jenis jamban, menjadi hal yang menarik untuk dikaitkan dengan rumah tangga miskin.

Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih selama tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebanyak 42,25 persen rumah tangga miskin menggunakan air bersih dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 55,32 persen, sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak pada tahun 2016 sebanyak 41,89 persen. Sejalan dengan penggunaan air bersih/air layak, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban baik sendiri maupun bersama juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sebanyak 71,65 persen, meningkat pada tahun 2014 menjadi 71,83 persen dan terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 81,65 persen.

**Tabel 7.5 Karakteristik Perumahan Pada Rumah Tangga Miskin, 2013-2016**

Rincian	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
% Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih/Air Layak	42,25	65,59	55,32	41,89
% Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama	71,65	71,83	76,60	81,65

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2013-2016



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Dumairy. 2002. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Erlanga
- Mantra, Ida Bagoes. 2000. Demografi Umum. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Foller, M. 1992. Social Determinants of Health and Disease: The Role of Small- Scale Projects Illustrated by the Koster Health Project in Sweden and Ametra in Peru. *Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro*, 8 (3), 229-239.
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2014. *Economic Development 12th Edition*. Amerika Serikat : George Washington University.
- Wang, Wenjuan, Sournya Alva, Shanxiao Wang & Alfredo Fort. 2011. *Levels and Trends in The Use of Maternal Health Services in Developing Country*. DHS Comparative Report 26. Maryland, USA : The United States Agency for International Development (USAID).





# Lampiran

<https://purworejokab.go.id>



**Lampiran 1**  
**Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo Menurut Kecamatan, 2010-2016**

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)
Grabag	42.706	42.895	43.078	43.253	43.404	43.550	43.691
Ngombol	30.831	30.967	31.100	31.226	31.334	31.439	31.541
Purwodadi	36.496	36.658	36.814	36.963	37.093	37.218	37.338
Bagelen	28.757	28.884	29.008	29.125	29.227	29.325	29.420
Kaligesing	29.156	29.285	29.410	29.529	29.633	29.733	29.829
Purworejo	83.046	83.412	83.770	84.111	84.407	84.691	84.966
Banyuurip	40.052	40.229	40.402	40.567	40.710	40.848	40.981
Bayan	45.714	45.917	46.114	46.302	46.465	46.623	46.774
Kutoarjo	58.274	58.530	58.780	59.018	59.227	59.425	59.618
Butuh	38.853	39.025	39.192	39.350	39.489	39.621	39.749
Pituruh	45.745	45.947	46.143	46.330	46.493	46.649	46.799
Kemiri	50.697	50.920	51.138	51.345	51.525	51.698	51.865
Bruno	43.346	43.538	43.724	43.901	44.055	44.203	44.346
Gebang	39.897	40.072	40.244	40.408	40.549	40.685	40.817
Loano	34.603	34.756	34.905	35.045	36.169	35.287	35.401
Bener	48.434	48.647	48.856	49.054	49.226	49.391	49.551
<b>Total</b>	<b>696.607</b>	<b>699.682</b>	<b>702.678</b>	<b>705.527</b>	<b>709.006</b>	<b>710.386</b>	<b>712.686</b>

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

**Lampiran 2**  
**Kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo (orang/km<sup>2</sup>) Menurut Kecamatan, 2010-2016**

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)
Grabag	658	661	664	666	669	671	673
Ngombol	558	560	563	565	567	569	571
Purwodadi	676	679	682	685	687	690	692
Bagelen	451	453	455	457	458	460	461
Kaligesing	390	392	394	395	397	398	399
Purworejo	1.575	1.582	1.589	1.595	1.601	1.606	1.612
Banyuurip	888	892	896	900	903	906	909
Bayan	1.058	1.063	1.067	1.072	1.075	1.079	1.082
Kutoarjo	1.550	1.557	1.564	1.570	1.576	1.581	1.586
Butuh	843	847	851	854	857	860	863
Pituruh	591	593	596	598	601	603	604
Kemiri	551	553	556	558	560	562	563
Bruno	400	402	403	405	406	408	409
Gebang	555	558	560	562	564	566	568
Loano	645	648	651	653	656	658	660
Bener	515	517	519	521	523	525	527
<b>Purworejo</b>	<b>673</b>	<b>676</b>	<b>679</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>	<b>689</b>

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

**Lampiran 3**  
**Kemiskinan Kabupaten Purworejo, 2011-2016**

Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Miskin (Dalam 000)	121,90	114,80	109,00	102,11	101,25	99,07
Persentase Penduduk Miskin	17,51	16,32	15,44	14,41	14,27	13,91
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,82	2,78	1,98	1,85	2,43	2,67
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,74	0,65	0,43	0,42	0,63	0,76
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	235.459	254.314	273.481	284.409	294.158	313.931

Sumber : BPS



# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

<https://purworejokab.go.id>



**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Purworejo**

Jl. Banyuurip, Purworejo. 54171. Telepon : (0275) 321218

Email : bps3306@bps.go.id